

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agustina ,Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Amin, Rahman. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Dientha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Djojodirjo, M.A. Moegni. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fuady, Munir. 2014. *Konnsep Hukum Perdata*. Cetakan Petama. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gunagera. 2013. *Rakyat & Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, M. Yahya. 1989. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria di Indonesia Sejarah Pembentukannya Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaanya*. Jakarta: Djambatan.
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Murad, Rusmadi. 1999. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni.

- Natsir, Jufri dkk. 2021. *Pemalsuan Surat Tanah Rinci Dan Sanksi Tindak Pidana*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida.
- Prodjodikoro, Wirdjono. 2000. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Cetakan ke 8. Bandung: CV Mandar Maju.
- Qamar, Nurul dkk. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: Social Politic Genius.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Sangsun, SP Florianus. 2007. *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta: Visimedia.
- Santoso, Urip. 2010. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Satrio, J. 2012. *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*. Cetakan ke 10. Jakarta: Citra Aditya.
- Setiabudi, Jayadi. 2012. *Tata Cara Mengurus Tanah, Rumah Serta Segala Perizinannya*. Jakarta: Suka Buku.
- Setiawan, Rakhman. 1977. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta.
- Setiawan, Rakhman. 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Alumni.
- Simorangkir, J.T.C. dkk. 1980. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sumardjono, Maria S.W. 2005. *Kebijakan pertanahan antara regulasi dan implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Syarief, Elza. 2014. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Cetakan ke 2. Jakarta: Gramedia

B. PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23)

Het Herziene Indonesisch Reglement / Reglement voor de Buitengewesten
(*Staatsblad* Tahun 1848 Nomor 16)

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696)
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630)
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6631)
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 130)
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 175)
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 414)
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1369).
- Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 91)

C. LAIN-LAIN

Abdat, Amelia Akef dan Atik Winanti. 2020. *Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Eigendom Verponding Yang dikuasai Pihak Lain*, Prosiding: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society.

Alifah, Nurul Rezky. 2021. Skripsi : *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penggusuran Paksa Prespektif Syari'ah dan Hukum*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Annisa Oktaviani P, Harjono. 2019. *Kekuatan Pembuktian Surat Letter C Dalam Pemeriksaan Sengketa Tanah Di Persidangan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Perkara No: 816 K/Pdt/2016)*, Jurnal Verstek Volume 7. Nomor 1.

Apriani, Titin. 2021. *Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata*, Jurnal Ganec Swara. Nomor. 1 Volume. 15.

Bagali, Dedy Purwanto. 2015. *Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Bersertifikat Ganda*, Jurnal Hukum Lex Privatum. Volume 3. Nomor 4.

David, Dave. 2021. *Keberadaan Surat Ijo Dikaji Berdasarkan Pendekatan Kasus Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch*, Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Volume 9. Nomor 4.

Hasil wawancara dengan PT Kereta Api Indonesia DAOP 8 Kota Surabaya pada tanggal 15 November 2022.

Hasil Wawancara dengan Kelurahan Alon Alon Centong pada tanggal 24 November 2022.

Hasil wawancara dengan Kuasa Hukum Yayasan Babussalam Barokah pada tanggal 22 November 2022 melalui Telepon.

Hidayat, Fitri. *Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum*, diakses dari <http://fitrihidayatub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>. pada tanggal 3 November 2022.

KBBI Daring - Kementerian Pendidikan dan diakses dari Kebudayaan <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, pada tanggal 3 November 2022.

- Masnadi, dkk. 2019. *Kepastian Hukum Terhadap Surat Girik Sebagai Dasar Bukti Pendaftaran Hak Atas Tanah*, Jurnal Nuansa Kenotariatan Volume 5. Nomor 1.
- Mezak, Meray Hendrik. 2006. *Pendaftaran Tanah Sebagai Tanah Administrasi Pertanahan dan Jaminan Kepastian Hukum terhadap Pemegang Hak-hak Atas*. Jurnal Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Volume 6. Nomor 2.
- Pahlev, Farida Sekti. 2022. *Kekuatan Hukum GRONDKAART dan Problematikanya di Indonesia*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Volume 4. Nomor 1.
- Purnomo, Raudya Niesa Ghani. 2020. Skripsi : *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Menguasai Tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero)*. Jember: Universitas Jember.
- Puspadiena, Reiska Mei. 2020. Skripsi : *Tinjauan Yuridis Penguasaan Hak Atas Tanah Milik Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) Oleh Masyarakat Dikawasan Stasiun Tegal*. Tegal: Universitas Pancasakti Tegal.
- Putri ,Ayu Bimo Setyo. 2017. *Itikad Baik Pada Pendaftaran Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan*, Jurnal Cakrawala Hukum, Voume 8. Nomor 1.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Slamet, Sri Redjeki. 2013. *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*, Lex Jurnalica, Volume 10. Nomor 2.
- Ulfah, M dkk. 2019. *Kedudukan Petok D Dalam Proses Pendaftaran Tanah*, Jurnal Reformasi Hukum : *Cogito Ergo Sum*, Volume 2. Nomor 1.
- Widarbo, Koes. 2021. *Problematika Yuridis Tanah Gogol Gilir Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Tunas Agraria. Volume 4. Nomor 3.
- Yamin, Muhammad dan Zaidar. 2018. *Pendaftaran Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Tanah Dan Upaya Meminimalisir Konflik Pertanahan*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 13. Nomor 2.

